



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.213, 2023

BPOM. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses  
Arsip Dinamis. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku pencipta arsip perlu mengatur sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa ketentuan mengenai sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2018 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang selanjutnya disebut SKKAAD adalah sistem pengelolaan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis, Klasifikasi Akses Arsip Dinamis dan Pengamanan Arsip Dinamis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
5. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
6. Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
7. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
8. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
9. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip.
10. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
11. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
12. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
13. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
14. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
15. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
16. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
17. Publik adalah warganegara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
18. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah

- nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
19. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
  20. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

#### Pasal 2

- (1) SKKAAD merupakan petunjuk pelaksanaan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPOM dalam melakukan pengelolaan Arsip Dinamis dan penentuan hak Akses Arsip bagi publik, serta perlindungan terhadap keamanan Arsip.
- (2) Ruang lingkup SKKAAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis;
  - b. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis;
  - c. Pengamanan Arsip Dinamis; dan
  - d. penyusunan daftar klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis.

### BAB II

#### KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

#### Pasal 3

Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. Biasa/Terbuka;
- b. Terbatas; dan
- c. Rahasia.

### BAB III

#### KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS

#### Pasal 4

- (1) Klasifikasi Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b digunakan untuk:
  - a. Pengguna Internal; dan
  - b. Pengguna Eksternal.
- (2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. penentu kebijakan yang terdiri atas:
    1. Kepala Badan;
    2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
    3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. pelaksana kebijakan yang terdiri atas:
    1. pejabat administrator;
    2. pejabat pengawas;
    3. pejabat fungsional; dan
    4. pelaksana;
  - c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan BPOM.

- (3) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Publik;
  - b. pengawas eksternal; dan
  - c. aparat penegak hukum.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 2 mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada:
  - a. di bawah kewenangannya; dan
  - b. di bawah kewenangan Kepala Badan dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang setingkat sepanjang mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 3 mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada:
  - a. di bawah kewenangannya; dan
  - b. di bawah kewenangan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya selaku atasan langsung dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang setingkat sepanjang mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana di lingkungan BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 1 sampai dengan angka 4 mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Biasa/Terbuka.
- (2) Dalam hal pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana di lingkungan BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengakses Arsip dengan tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Terbatas atau Rahasia, perlu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 7

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip BPOM dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip

BPOM dengan tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Biasa/Terbuka.

- (2) Dalam hal Arsip dengan tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Terbatas dan Rahasia mengandung informasi yang terkait dengan kepentingan publik, pejabat yang berwenang dapat memberikan akses Arsip Dinamis Terbatas dan Rahasia kepada Publik sepanjang pemohon dapat membuktikan Arsip Dinamis Terbatas dan Rahasia dimaksud terkait dengan dirinya.

#### Pasal 9

Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip BPOM dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c mempunyai hak untuk mengakses Arsip BPOM yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

### PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

#### Pasal 11

- (1) Pengamanan Arsip Dinamis di lingkungan BPOM meliputi penyimpanan dan penyampaian fisik dan informasi Arsip Dinamis yang dilaksanakan sesuai dengan tingkat klasifikasi keamanan.
- (2) Ketentuan mengenai Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 12

- (1) Penyimpanan fisik dan informasi Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tempat penyimpanan Arsip konvensional terdiri atas:
    1. *filing cabinet* atau rak Arsip untuk menyimpan Arsip Dinamis dengan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Biasa/Terbuka dan Terbatas; dan
    2. brankas atau lemari besi untuk menyimpan Arsip Dinamis dengan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Rahasia;

- b. tempat penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis; dan
  - c. ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis.
- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Terjaga, dan Arsip Vital; dan
  - b. aplikasi pengelolaan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif.
- (4) Ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilengkapi dengan fasilitas pengamanan berupa:
- a. kamera pengawas;
  - b. kunci pengamanan ruangan;
  - c. tabung pemadam kebakaran; dan/atau
  - d. media simpan Arsip.

### Pasal 13

Penyampaian dalam rangka penanganan fisik maupun informasi Arsip Dinamis konvensional sesuai dengan klasifikasi dapat dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyampaian informasi Arsip Dinamis dengan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Biasa/Terbuka tidak ada persyaratan prosedur khusus;
- b. penyampaian informasi Arsip Dinamis dengan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Terbatas dan/atau Rahasia:
  - 1. diberi kode “Terbatas” atau “Rahasia”;
  - 2. menggunakan amplop rangkap dua;
  - 3. menggunakan amplop segel, stempel terbatas, dan Rahasia; dan
  - 4. dikirim melalui orang yang sudah diberi kewenangan dan tanggung jawab terhadap pengendalian Arsip atau dokumen Terbatas dan Rahasia.

### Pasal 14

Penyampaian dalam rangka penanganan informasi Arsip Dinamis elektronik sesuai dengan klasifikasi dapat dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyampaian informasi Arsip Dinamis dengan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Biasa/Terbuka tidak ada prosedur khusus;
- b. penyampaian informasi Arsip Dinamis dengan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Terbatas menggunakan paling sedikit enkripsi, surat elektronik yang dikirim dengan alamat khusus, atau *password* apabila pesan elektronik atau surat elektronik berisi data informasi personal; dan
- c. penyampaian informasi Arsip Dinamis dengan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Terbatas dan Rahasia yaitu:
  - 1. menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau surat elektronik Terbatas dan Rahasia;

2. menggunakan persandian atau kriptografi; dan
3. harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau surat elektronik.

## BAB V PENYUSUNAN DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

### Pasal 15

- (1) Format penyusunan daftar klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis terdiri atas:
  - a. nomor;
  - b. kode klasifikasi;
  - c. jenis Arsip;
  - d. klasifikasi keamanan;
  - e. hak akses;
  - f. dasar pertimbangan; dan
  - g. unit pengolah.
- (2) Ketentuan mengenai daftar klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 325), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 17

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PENGAMANAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

A. PENYIMPANAN

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	ARSIP MEDIA KONVENSIONAL			ARSIP MEDIA ELEKTRONIK		
		ARSIP	PENGGUNA	SARANA & PRASARANA	ARSIP	PENGGUNA	SARANA & PRASARANA
1.	Biasa/Terbuka	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus	Back-up secara teratur untuk pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus
2.	Rahasia	a. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "RAHASIA" pada arsip fisik b. Tidak sembarangan	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, APIP di lingkungan BPOM dan pengawas eksternal serta penegak hukum	Lokasi aman dengan akses yang terbatas	a. Back-up secara teratur untuk pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip b. File/file elektronik (termasuk	a. Hanya staf yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang yang dapat mengakses arsip tersebut b. Autentikasi pengguna (nama pengguna / password atau ID digital)	a. Langkah-langkah keamanan dengan Operating System khusus atau aplikasi khusus b. Firewall serta sistem prosedur deteksi

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	ARSIP MEDIA KONVENSIONAL			ARSIP MEDIA ELEKTRONIK		
		ARSIP	PENGGUNA	SARANA & PRASARANA	ARSIP	PENGGUNA	SARANA & PRASARANA
		meletakkan arsip/ dokumen yang bersifat rahasia			<i>database</i> harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak- pihak eksternal.	c. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual	terhadap intrusi. <i>Firewall</i> adalah sistem untuk melindungi komputer atau jaringan dari akses komputer lain yang tidak memiliki hak untuk mengakses komputer atau jaringan kita
3.	Terbatas	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "TERBATAS" pada fisik arsip	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, APIP di lingkungan BPOM dan pengawas eksternal serta penegak hukum	Diperlukan tempat penyimpanan yang aman	a. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip. b. <i>File-file</i> elektronik (termasuk <i>database</i> ) harus dilindungi terhadap	a. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ <i>password</i> atau ID digital) b. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual	a. Autentikasi <i>server</i> b. Langkah- langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi khusus c. <i>Firewall</i> dan sistem serta prosedur deteksi terhadap

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	ARSIP MEDIA KONVENSIONAL			ARSIP MEDIA ELEKTRONIK		
		ARSIP	PENGGUNA	SARANA & PRASARANA	ARSIP	PENGGUNA	SARANA & PRASARANA
					penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal.		intrusi

## B. PENYAMPAIAN

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	ARSIP MEDIA KONVENSIONAL	ARSIP MEDIA ELEKTRONIK
1.	Biasa/terbuka	Tidak ada persyaratan prosedur khusus.	Tidak ada prosedur khusus.
2.	Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diberi kode rahasia</li> <li>b. Menggunakan amplop p dobel</li> <li>c. Amplop segel, stempel rahasia.</li> <li>d. Konfirmasi tanda terima.</li> <li>e. Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/ dokumen rahasia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau <i>email</i>.</li> <li>b. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau <i>email</i> rahasia.</li> <li>c. Menggunakan persandian atau kriptografi.</li> </ul>
3.	Terbatas	Amplop segel.	Apabila pesan elektronik atau <i>email</i> berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, <i>email</i> yang dikirim dengan alamat khusus, <i>password</i> , dan lain-lain.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

A. DAFTAR KLASIFIKASI DAN KEAMANAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
I	KEPEGAWAIAN					
1	KP.01	<i>Bezzeting/ Data Persediaan Pegawai</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM
2	KP.02	<b>Formasi Pegawai</b>				
	KP.02.01	Usulan Permintaan Formasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	KP.02.02	Persetujuan/Penetapan Formasi Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	KP.02.03	Penetapan Formasi Khusus	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
3	KP.03	<b>Pengadaan Pegawai</b>				
	KP.03.01	Penerimaan a. Lamaran Peserta yang Diterima - Pengumuman Penerimaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Lamaran Peserta - Panggilan Peserta Seleksi - Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan				
		b. Lamaran Peserta yang Tidak Diterima	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	
	<b>KP.03.02</b>	Pengangkatan CPNS dan PNS - Hasil Pemeriksaan Kesehatan - SK Pengangkatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM
	<b>KP.03.03</b>	Prajabatan - Laporan Pelaksanaan Prajabatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM
	<b>KP.03.04</b>	Penempatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM
<b>4</b>	<b>KP.04</b>	- Surat Pernyataan Rencana Penempatan <b>Ujian Kenaikan Pangkat/ Jabatan dan Uji Kompetensi</b>				
	<b>KP.04.01</b>	Hasil Ujian Penyesuaian Ijazah	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	<b>KP.04.02</b>	Hasil Ujian Dinas	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	<b>KP.04.03</b>	Hasil Uji Kompetensi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
<b>5</b>	<b>KP.05</b>	<b>Mutasi Pegawai</b>				
	<b>KP.05.01</b>	Nota Persetujuan/ Pertimbangan Kepala	Terbatas	Pejabat	Dapat mengakibatkan	Biro SDM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		BKN		Pimpinan Tinggi Pratama	terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	
	<b>KP.05.02</b>	Kenaikan Pangkat/ Golongan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	<b>KP.05.03</b>	Kenaikan Gaji Berkala	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	<b>KP.05.04</b>	Penyesuaian Masa Kerja	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	<b>KP.05.05</b>	Mutasi Keluarga	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	<b>KP.05.06</b>	Usul penetapan perubahan data dasar/ status/ kedudukan hukum pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	<b>KP.05.07</b>	Penyesuaian Tunjangan Kinerja	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	<b>KP.05.08</b>	Promosi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	<b>KP.05.09</b>	Rotasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	<b>KP.05.10</b>	Perencanaan Suksesi Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	<b>KP.05.11</b>	Seleksi Biasa/Terbuka	Terbatas	Pejabat	Dapat mengakibatkan	Biro SDM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Pimpinan Tinggi Pratama	terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	
	KP.05.12	Alih Tugas	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
6	KP.06	<b>Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai</b>				
	KP.06.01	Pengangkatan Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	KP.06.02	Pemberhentian Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	KP.06.03	Pemberhentian Pegawai tanpa Hak Penstun	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
7	KP.07	<b>Pendelegasian Wewenang</b>				
	KP.07.01	Pelaksana Tugas (Pt)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM
	KP.07.02	Pelaksana Harian (Plh)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM
8	KP.08	<b>Administrasi Pegawai</b>				
	KP.08.01	Data / Keterangan Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM, Balai Besar/Balai, Loka
	KP.08.02	Kartu Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
	KP.08.03	Karis / Karsu	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP.08.04	Kartu Taspen	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
	KP.08.05	Kartu Akses/ BPJS/ Jamkesmas	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
9	KP.09	<b>Pembinaan Karir Pegawai</b>				
	KP.09.01	Penilaian Prestasi Kerja	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
	KP.09.02	Pembinaan Mental	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
	KP.09.03	Disiplin Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
	KP.09.04	Tanda Jasa/Penghargaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM
10	KP.10	<b>Pembinaan Jabatan Fungsional</b>				
	KP.10.01	Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
	KP.10.02	Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	
	KP.10.03	Pemindahan Jabatan Fungsional Tertentu	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	
11	KP.11	<b>Kesejahteraan Pegawai</b>				
	KP.11.01	Kesehatan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Rekam Medik		Tinggi Pratama	pribadi	
	<b>KP.11.02</b>	Cuti	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM, Balai Besar/Balai, Loka
	<b>KP.11.03</b>	Rekreasi/ Kesenian/ Olahraga/ HUT/kegiatan keagamaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM, Balai Besar/Balai, Loka
	<b>KP.11.04</b>	Bantuan Sosial	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM, Balai Besar/Balai, Loka
	<b>KP.11.05</b>	Pinjaman Dana dan Perumahan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM, Balai Besar/Balai, Loka
	<b>KP.11.06</b>	Tunjangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
<b>12</b>	<b>KP.12</b>	<b>Perselisihan/Sengketa/Keberatan</b>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
<b>13</b>	<b>KP.13</b>	<b>Organisasi Non Kedinasan</b>				
	<b>KP.13.01</b>	KORPRI	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM
	<b>KP.13.02</b>	Dharma Wanita	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM
	<b>KP.13.03</b>	Perhimpunan Kepedulian Sosial Pegawai Badan POM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM
	<b>KP.13.04</b>	Koperasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan	-	Biro SDM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP.13.05	Lain-lain	Biasa/Terbuka	Tinggi Pratama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM
14	KP.14	Berkas Perorangan Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
15	KP.15	Manajemen Talenta	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
16	KP.16	Sistem Merit	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	
17	KP.17	Indeks Profesionalitas	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
II	OT	<b>ORGANISASI DAN TATA LAKSANA</b>				
1	OT.01	<b>Kelembagaan/Organisasi</b>				
	OT.01.01	Analisis Kelembagaan	Biasa/Terbuka		-	Biro Hukum dan Organisasi
		- Pembentukan Unit Kerja - Perubahan Unit Kerja - Pembubaran Unit Kerja				
	OT.01.02	Evaluasi Kelembagaan	Biasa/Terbuka		-	Biro Hukum dan Organisasi
		- Perubahan Organisasi - Penyempurnaan organisasi.				
	OT.01.03	Reformasi Birokrasi	Biasa/Terbuka		-	Biro Hukum dan Organisasi
2	OT.02	<b>Tata Laksana</b>				
	OT.02.01	Penyusunan Standar/ Pedoman/Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk	Terbatas	Pejabat Pimpinan	Dapat menghambat penyusunan kebijakan	Biro Hukum dan Organisasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Teknis		Tinggi Pratama	karena adanya pengungkapan secara prematur	
	OT.02.02	Monitoring dan Evaluasi SOP	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Hukum dan Organisasi
	OT.02.03	Sistem Manajemen Mutu	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Hukum dan Organisasi
	OT.03	<b>Layanan Publik</b>				
	OT.03.01	Layanan Pengaduan Masyarakat	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Hukum dan Organisasi
	OT.03.02	Layanan Komunikasi Informasi Edukasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Hukum dan Organisasi
	OT.03.03	Layanan Informasi Publik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Hukum dan Organisasi
	OT.03.04	Pengembangan Layanan Publik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Hukum dan Organisasi
III	HK	<b>HUKUM</b>				
1	HK.01	<b>Program Legislasi</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Hukum dan Organisasi
2	HK.02	<b>Produk Hukum</b>				
	HK.02.01	Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Hukum dan Organisasi
		- RUU / Perpu - Peraturan Pemerintah				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Peraturan/keputusan, instruksi presiden - Peraturan Pimpinan Badan POM Produkt Hukum yang Bersifat Penetapan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama		Biro Hukum dan Organisasi
	<b>HK.02.02</b>	- Keputusan Kepala Badan - Keputusan Eselon I - Keputusan Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro/Kepala Balai Besar/Kepala Balai POM, Kepala Loka POM - Surat Edaran - Instruksi.				
<b>3</b>	<b>HK.03</b>	<b>Dokumentasi Hukum</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Hukum dan Organisasi
<b>4</b>	<b>HK.04</b>	<b>Penanganan Perkara Litigasi</b>				
	<b>HK.04.01</b>	Perkara Perdata/Niaga	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat proses penyelidikan dan tindak pidana dan / atau administratif	Biro Hukum dan Organisasi
	<b>HK.04.02</b>	Perkara Praperadilan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat proses penyelidikan dan tindak pidana dan / atau administratif	Biro Hukum dan Organisasi
	<b>HK.04.03</b>	Perkara Pidana	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat proses penyelidikan dan tindak pidana dan / atau administratif	Biro Hukum dan Organisasi
	<b>HK.04.04</b>	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)/	Terbatas	Pejabat	Dapat menghambat	Biro Hukum dan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
5	HK.05	Penanganan Perkara Non Litigasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Organisasi
6	HK.06	Pertimbangan Hukum		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Hukum dan Organisasi
	HK.06.01	Pertimbangan Hukum Permasalahan di Bidang Obat dan Makanan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Biro Hukum dan Organisasi
	HK.06.02	Pertimbangan hukum Lainnya di Lingkungan BPOM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Biro Hukum dan Organisasi
7	HK.07	Sosialisasi/ Penyuluhan/Pembinaan Hukum	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Hukum dan Organisasi
IV	PR	PERENCANAAN				
1	PR.01	Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan				
	PR.01.01	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.01.02	Rencana Pembangunan Jangka Menengah/ Master Plan (RPJM/MP)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
2	PR.02	Program Kerja Tahunan				
	PR.02.01	Usulan Unit Kerja beserta Data Pendukung	Biasa/Terbuka	Pejabat	-	Biro Perencanaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Pimpinan Tinggi Pratama		dan Keuangan
	PR.02.02	Program Kerja Tahunan Unit Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.02.03	Program Kerja Tahunan Instansi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
3	PR.03	<b>Penetapan/Kontrak Kerja</b>				
	PR.03.01	Kepala BPOM dan Pejabat Eselon I	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.03.02	Pimpinan Unit Kerja (Pejabat Eselon dan Kepala UPT)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
4	PR.04	<b>Indikator Kinerja Utama</b>				
	PR.04.01	Indikator Kinerja Utama BPOM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.04.02	Indikator Kinerja Utama Unit Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
5	PR.05	<b>Perencanaan Anggaran</b>				
	PR.05.01	RKA-KL/Pagu Indikatif/Sementara	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.05.02	Pagu Definitif	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.05.03	DIPA	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PR.05.04	POK	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.05.05	Target PNBPP	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
6	PR.06	<b>Rencana Kinerja Tahunan</b>				
	PR.06.01	Rencana Kinerja Unit Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.06.02	Rencana Kinerja Instansi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
7	PR.07	<b>Perjanjian Kinerja</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
8	PR.08	<b>Laporan</b>				
	PR.08.01	Laporan Bulanan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.08.02	Laporan Triwulan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.08.03	Laporan Semesteran	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.08.04	Laporan Tahunan Unit Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.08.05	Laporan Tahunan UPT	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PR.08.06	Laporan Tahunan BPOM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.08.07	Laporan Insidental	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
9	PR.09	<b>Laporan Kinerja</b>				
	PR.09.01	Laporan Kinerja Unit kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.09.02	Laporan Kinerja UPT				
	PR.09.03	Laporan Kinerja BPOM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
10	PR.10	<b>Evaluasi Program</b>				
	PR.10.01	Evaluasi Program Unit Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.10.02	Evaluasi Program BPOM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
V	KU	<b>KEUANGAN</b>				
1	KU.01	<b>Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan RUU APBN-P</b>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
2	KU.02	<b>Pelaksanaan Anggaran</b>				
	KU.02.01	Pengajuan UP/TUP	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	KU.02.02	Pencairan Anggaran	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-GU (Ganti Uang),</li> <li>- SPP-LS (Langsung), SPP-UP (Uang Persediaan),</li> <li>- SSP-TUP (Tambahan Uang Persediaan)</li> <li>- Surat Kuasa sampai Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>-Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),</li> <li>- Juklak/ mekanisme pengelolaan APBN</li> <li>- Bahan Nota Keuangan.</li> </ul>				
	<b>KU.02.03</b>	Pengelolaan Belanja Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	<b>KU.02.04</b>	Keterangan Penghasilan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	<b>KU.02.05</b>	SKPP	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	<b>KU.02.06</b>	Laporan Arus Kas	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Pemeriksaan</li> <li>- Kas/ register Penutupan Kas</li> <li>- Laporan realisasi anggaran (LRA) termasuk Arsip data komputer (ADK)</li> <li>- Laporan Penerimaan Negara</li> <li>- Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Triwulan/Semesteran</li> </ul>				
	<b>KU.02.07</b>	Data Rekening Bendahara	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3	KU.03	Pengelolaan Perbendaharaan Perbendaharaan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	KU.03.02	KP4 (Kartu Pengawas Pembayaran Penghasilan Pegawai)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	KU.03.04	Penerimaan Non Pajak	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	KU.03.06	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
KU.03.08	Verifikasi Anggaran	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	
						KU.04
4	KU.04.01	Bantuan/Hibah/Pinjaman Luar Negeri Kesanggupan Negara Donor	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
		Nota Kesepahaman (MoU)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	<b>KU.04.03</b>	Loan Agreement PHLN KS  - <i>Draft Agreement</i> - <i>Legal opinion</i> - Korespondensi dengan lender	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	<b>KU.04.04</b>	Alokasi dan Relokasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	<b>KU.04.05</b>	Realisasi Pencairan Dana BLN	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	<b>KU.04.06</b>	- SP2D - SPM beserta lampiran antara lain SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya. <i>Replenishment</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	<b>KU.04.07</b>	- <i>No Objection Letter (NOL)</i> - <i>Project implementation</i> - <i>Notification of contract</i> - <i>Withdrawal authorization (WA)</i> - <i>Statement of Expenditure (SE)</i> <i>Staff Appraisal Report</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	<b>KU.04.08</b>	Report/Laporan  - <i>Progress report</i> - <i>Monthly Report</i> - <i>Quarterly report</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	<b>KU.04.09</b>	Ketentuan/Peraturan Pinjam Luar Negeri (Pindah Bag. Hukum)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
<b>5</b>	<b>KU.05</b>	<b>Sistem Akuntansi Instansi (SAI)</b>				
	<b>KU.05.01</b>	Kebijakan SAI	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	<b>KU.05.02</b>	Berita Acara Rekonsiliasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	<b>KU.05.03</b>	Daftar Transaksi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Transaksi (DT)</li> <li>- Pengeluaran (PK)</li> <li>- Penerimaan (PN)</li> <li>- Dokumen Sumber (DS)</li> <li>- Bukti Jurnal (BJ)</li> <li>- Surat Tanda Setor (STS)</li> <li>- Surat Setor Bukan Pajak (SSBP)</li> <li>- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)</li> <li>- SPM</li> <li>- Daftar ringkasan pengembalian dan potongan dari pengeluaran (SPDR)</li> </ul>				
	<b>KU.05.04</b>	Laporan Realisasi Bulanan SAI	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	<b>KU.05.05</b>	Laporan Realisasi Triwulan SAI	Terbatas	Pejabat	Terkait dengan proses	Biro Perencanaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	<b>KU.05.06</b>	Laporan Keuangan	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama	pengolahan informasi	dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
		- Laporan Keuangan Bulanan - Laporan Keuangan Triwulan - Laporan Keuangan Semester - Laporan Keuangan Tahunan ( <i>Unaudited</i> ) - Laporan Keuangan Tahunan <i>Audited</i>		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
<b>VI</b>	<b>KS</b>	<b>KERJA SAMA</b>				
<b>1</b>	<b>KS.01</b> <b>KS.01.01</b>	<b>Kerja Sama Dalam Negeri</b> Antar Instansi Pemerintah	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
		- Hasil kajian - Perjanjian Kerja Sama - Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Organisasi Non Pemerintah				
	<b>KS.01.02</b>	Organisasi Non Pemerintah	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
		- Hasil kajian - Perjanjian Kerja Sama - Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi				
<b>2</b>	<b>KS.02</b> <b>KS.02.01</b>	<b>Kerja Sama Luar Negeri</b> <b>Bilateral</b>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
		- Hasil kajian - Perjanjian Kerja Sama				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KS.02.02	- Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi <b>Multi-lateral</b>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
	KS.02.03	- Hasil kajian - Perjanjian Kerja Sama - Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi <b>Regional</b>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
VII	HM	- Hasil kajian - Perjanjian Kerja Sama - Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi <b>HUBUNGAN MASYARAKAT</b>				
1	HM.01	<b>Komunikasi dan Publikasi</b>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
		- Dokumen wawancara dan <i>talkshow</i> - Siaran pers/klarifikasi/penjelasan - Laporan <i>monitoring</i> pemberitaan - Materi media sosial				
2	HM.02	<b>Dengar Pendapat/ Hearing DPR terkait BPOM</b>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
		- Bahan sidang kabinet - RDD DPR/DPD RI - Rakor Tingkat Badan termasuk hasil rumusan dan transkrip - Bahan rapat terbatas BPOM - Pidato Kepala BPOM				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3		- Bahan Pidato Kenegaraan				
	HM.03	<b>Hubungan Antar Lembaga</b> Lembaga Negara	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
	HM.03.01					
	HM.03.02	Perusahaan - Pernyataan Badan POM terkait masalah Obat dan Makanan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
	HM.03.03	Organisasi Kemasyarakatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
4	HM.03.04	- Release Badan POM terkait masalah Obat dan Makanan Perguruan Tinggi/ Sekolah	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
	HM.03.05	- Permohonan Narasumber Bakohumas	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
	HM.04	- Surat Undangan Diseminasi Informasi				
	HM.04.01	<b>Keprotokolan</b> Upacara/ Acara Kedinasan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
	HM.04.02	Kunjungan Dinas Pimpinan Lembaga	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
HM.04.03	Agenda Pimpinan BPOM	Terbatas	Pejabat Pimpinan	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi	Biro Umum	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
5	HM.05	Penyiapan Dokumen Substansi Teknis Pimpinan  - Bahan Informasi (hasil telaahan, <i>policy brief</i> , rancangan eksekutif - <i>naskah/pointer</i> sambutan, materi presentasi, materi wawancara dengan media - laporan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi program strategis	Terbatas	Tinggi Pratama  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	penyelenggaraan negara Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
6	HM.06	Dokumentasi Hasil Liputan Kegiatan BPOM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
	HM.07	Penerbitan dan Publikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
7	HM.08	Pameran/Sayembara/Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk, dan Iklan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Hukum dan Organisasi
8	HM.09	Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
9	HM.10	Pemberian Ucapan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
10	HM.11	Pengelolaan Konten Website terkait berita aktual	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
VIII	PL	PERLENGKAPAN				
1	PL.01	Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	<b>PL.01.01</b>	Analisa Kebutuhan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		-Daftar barang dan jasa yang sudah ada -Usulan barang dan jasa yang akan diadakan dari unit kerja -Dokumen persetujuan pengadaan barang dan jasa (RKBMN)				
	<b>PL.01.02</b>	Daftar Penyedia Barang dan Jasa	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
<b>2</b>	<b>PL.02</b>	<b>Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>				
	<b>PL.02.01</b>	<i>E-Purchasing</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- Surat usulan dari penanggung jawab kegiatan kepada PPK, - KAK, - Spesifikasi Teknis, - Draft Kontrak, - HPS, - SPK, - BAST, - BA Pembayaran				
	<b>PL.02.02</b>	Pengadaan Langsung	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- Surat usulan dari penanggung jawab kegiatan kepada PPK, - KAK, - Spesifikasi Teknis, - Draft Kontrak,				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- HPS, - SPK, - BAST, - BA Pembayaran Penunjukan Langsung	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
	<b>PL.02.03</b>	- Surat usulan dari penanggung jawab kegiatan kepada PPK, - KAK, - Spesifikasi Teknis, - Draft Kontrak, - HPS, - SPK, - BAST, - BA Pembayaran - Dokumen penunjukan langsung Tender Cepat				
	<b>PL.02.04</b>	- Surat usulan dari penanggung jawab kegiatan kepada PPK, - KAK - Spesifikasi Teknis - Draft Kontrak - HPS - SPK - BAST - BA Pembayaran - Dokumen tender	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
	<b>PL.02.05</b>	Tender	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan	-	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat usulan dari penanggung jawab kegiatan kepada PPK,</li> <li>- KAK</li> <li>- Spesifikasi Teknis</li> <li>- <i>Drawft</i> Kontrak</li> <li>- HPS</li> <li>- SPK</li> <li>- BAST</li> <li>- BA Pembayaran</li> <li>- Dokumen tender</li> </ul>		Tinggi Pratama		
	<b>PL.02.06</b>	Swakelola	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Tim Swakelola</li> <li>- SK Pengadaan Swakelola</li> <li>- SK Tim Pemeriksa Swakelola</li> <li>- Dokumen Swakelola</li> </ul>				
	<b>PL.02.07</b>	Sayembara	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Tim Sayembara</li> <li>- SK Penetapan Sayembara</li> <li>- SK Penerima Hasil Sayembara</li> <li>- Dokumen Sayembara</li> </ul>				
<b>3</b>	<b>PL.03</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)</b>				
	<b>PL.03.01</b>	Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Penatausahaan BMN</li> <li>- Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)</li> </ul>				
	<b>PL.03.02</b>		Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan	-	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Tinggi Pratama		
	<b>PL.03.03</b>	- Daftar inventarisasi BMN Pendistribusian	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
	<b>PL.03.04</b>	- EAST Penetapan Status penggunaan BMN	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
	<b>PL.03.05</b>	Pemeliharaan BMN	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
	<b>PL.03.06</b>	- Usulan Pemeliharaan - Laporan Pemeliharaan Pemanfaatan BMN	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
	<b>PL.03.07</b>	- Usulan Pemanfaatan - Laporan Pemanfaatan Pemindahtanganan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
	<b>PL.03.08</b>	- Usulan Pemindahtanganan - Berita Acara Pemindahtanganan BMN Penyusutan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
	<b>PL.03.09</b>	- Daftar BMN yang akan disusutkan - Laporan Penyusutan - Berita Acara Penyusutan BMN Penghapusan BMN	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan	-	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Usulan daftar BMN yang akan dihapus - Daftar BMN yang dinilai kembali - SK Persetujuan penghapusan Pelaporan BMN		Tinggi Pratama		
	<b>PL.03.10</b>		Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
	<b>PL.03.11</b>	Pembinaan/Pengendalian/Pengawasan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
<b>IX</b>	<b>RT</b>	<b>KERUMAHTANGGAAN</b>				
<b>1</b>	<b>RT.01</b>	<b>Telekomunikasi</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- Daftar PABX - Bukti pembayaran				
<b>2</b>	<b>RT.02</b>	<b>Penggunaan Fasilitas Kantor</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- Form peminjaman fasilitas kantor - Permohonan peminjaman - Rekap penggunaan fasilitas kantor				
<b>3</b>	<b>RT.03</b>	<b>Pengurusan Kendaraan Dinas</b>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Umum
		- Form peminjaman kendaraan - Permohonan peminjaman kendaraan - Pengelolaan BBM kendaraan dinas - Form pemeliharaan kendaraan dinas				
<b>4</b>	<b>RT.04</b>	<b>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>	Terbatas	Pejabat Pimpinan	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Formulir permintaan perbaikan sarana dan prasarana - Permohonan perbaikan sarana dan prasarana - Rekap tahunan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana		Tinggi Pratama	penyelenggaraan negara	
5	RT.05	<b>Renovasi Gedung dan Bangunan</b> - Gambar Teknis Bangunan - Form usulan renovasi gedung dan bangunan - Laporan hasil pekerjaan renovasi gedung dan bangunan - BAST	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Umum
6	RT.06 RT.06.01	<b>Pemeliharaan Fasilitas Kantor</b> Jalan dan Lingkungan Kantor  - Form usulan pemeliharaan jalan dan lingkungan kantor - Laporan hasil pekerjaan pemeliharaan jalan dan lingkungan kantor Alat Elektronik dan Jaringan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
	RT.06.02	- Form usulan pemeliharaan jalan dan lingkungan kantor - Laporan hasil pekerjaan pemeliharaan jalan dan lingkungan kantor	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
7	RT.07	<b>Pengelolaan Lingkungan dan Limbah</b>				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	<b>RT.07.01</b>	Pengelolaan limbah laboratorium	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Umum
	<b>RT.07.02</b>	Pengelolaan K3	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- Permohonan - Hasil analisis pemeriksaan - Sertifikat hasil				
<b>8</b>	<b>RT.08</b>	<b>Ketertiban dan Keamanan</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- Jadwal penjagaan - Laporan ketertiban dan keamanan				
<b>X</b>	<b>KA</b>	<b>KEARSIPAN</b>				
<b>1</b>	<b>KA.01</b>	<b>Administrasi Persuratan</b>				
	<b>KA.01.01</b>	Pengurusan Surat Masuk	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- Buku agenda - Formulir/catatan permintaan dan layanan penggandaan arsip				
	<b>KA.01.02</b>	Pengurusan Surat Keluar	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- Buku Penomoran Surat - Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi				
<b>2</b>	<b>KA.02</b>	<b>Penyusunan Sistem</b>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3	KA.03	- Pedoman/Juklak/Juknis Kearsipan. <b>Pembinaan Kearsipan</b>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Biro Umum
4	KA.04	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis</b>				
	KA.04.01	Penataan Arsip	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Umum
	KA.04.02	Pemindahan Arsip	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Umum
	KA.04.03	Pemusnahan Arsip	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
	KA.04.04	Penyerahan Arsip	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
5	KA.05	<b>Persetujuan Jadwal Retensi Arsip</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
6	KA.06	<b>Layanan Kearsipan</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
XI	PS	<b>KEPUSTAKAAN</b>				
1	PS.01	<b>Pengadaan</b>				
	PS.01.01	Pengadaan Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Pejabat	-	Pusat Data dan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Usulan bahan pustaka		Pimpinan Tinggi Pratama		Informasi Obat dan Makanan
		- Daftar pengadaan bahan pustaka				
	<b>PS.01.02</b>	Pengadaan Penunjang Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
<b>2</b>	<b>PS.02</b>	<b>Sosialisasi Perpustakaan</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
<b>3</b>	<b>PS.03</b>	<b>Pengurusan ISBN/ISSN</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
<b>4</b>	<b>PS.04</b>	<b>Pengelolaan Bahan Pustaka</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
		- Surat Penerimaan buku dari Unit				
		- Surat Penyerahan buku atau majalah ke Unit				
		- Penyerahan Bukti Rekam Cetak Buku yang dihasilkan BPOM				
<b>5</b>	<b>PS.05</b>	<b>Layanan Pustaka</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
		- Form/buku peminjaman				
		- Form rujukan layanan pustaka				
<b>XII</b>	<b>TI</b>	<b>TEKNOLOGI DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN</b>				
<b>1</b>	<b>TI.01</b>	<b>INFRASTRUKTUR TIK</b>				
	<b>TI.01.01</b>	Tata Kelola Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	TI.01.02	Standar Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.01.03	Pemenuhan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.01.04	Tingkat Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi SDM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.01.05	Keluhan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.01.06	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
2	TI.02	<b>Sistem Informasi</b>				
	TI.02.01	Pengembangan Sistem <i>E-Government</i> Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital/ <i>Pengelolaan Website</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
3	TI.03	<b>Tata Kelola Data dan Informasi</b>				
	TI.03.01	Data Berbagi Pakai	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.03.02	Data dan Informasi yang Mutakhir	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.03.03	Standar Tata Kelola Data	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.03.04	Pemeliharaan sistem, pengembangan data	Biasa/Terbuka	Pejabat	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		dan informasi pada Badan POM <i>Operational Center</i>		Pimpinan Tinggi Pratama		Informasi Obat dan Makanan
	TI.03.05	Pemeliharaan Layanan <i>Contact Center</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.03.06	<i>Back Office Contact Center</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.03.07	Pengelolaan Data	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
4	TI.04	<b>Perencanaan dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>				
	TI.04.01	Pemenuhan BCM ( <i>Business Continuity Management</i> )	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.04.02	Indeks CSIRT ( <i>Cyber Security Incident Response Team</i> )	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.04.03	Standar Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.04.04	Pemeliharaan <i>Gateway</i> Tanda Tangan Elektronik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.04.05	Standar Sistem Informasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.04.06	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BPOM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.04.07	<i>Masterplan</i> TIK	Terbatas	Pejabat	Dapat mengakibatkan	Pusat Data dan Makanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
5	TI.05	<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Informasi Obat dan Makanan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
XIII	PB	<b>PENGEMBANGAN PEGAWAI (PENDIDIKAN DAN LATIHAN)</b>				
1	PB.01	<b>Standarisasi dan Penilaian Kompetensi SDM</b>				
	PB.01.01	Penyusunan Standar Kompetensi	Biasa/Terbuka			Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
	PB.01.02	Penyusunan Kurikulum Diklat  - Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis JF-PFM ( <i>Draft</i> ) - Pedoman Penyusunan Kurikulum ( <i>Draft</i> ) - Kurikulum Modul <i>Management Development Programme</i> (MDP) - Kurikulum Modul <i>Supervisor Development Programme</i> (SDP) - Kurikulum Modul <i>Eksekutif Development Programme</i> (EDP) ( <i>Draft</i> ) Penilaian Kompetensi Teknis	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama		Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
	PB.01.03		Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat mengakibatkan	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					kerugian terkait data pribadi	
	<b>PB.01.04</b>	Penilaian Kompetensi Manajerial	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
	<b>PB.01.05</b>	Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
	<b>PB.01.06</b>	Sertifikasi Kompetensi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
<b>2</b>	<b>PB.02</b>	<b>Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM</b>				
	<b>PB.02.01</b>	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	<b>PB.02.02</b>	Keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
	<b>PB.02.03</b>	Pendidikan Lanjutan SDM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
<b>3</b>	<b>PB.03</b>	Pengelolaan dan Pembinaan Pengawas Farmasi Obat dan Makanan (PPM)				
	<b>PB.03.01</b>	Penilaian Angka Kredit/Kinerja Pengawas Farmasi Obat dan Makanan (PPM)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
	<b>PB.03.02</b>	Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan dan <i>District Food Inspector</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
<b>XIV</b>	<b>PI</b>	<b>PENGAWASAN INTERN</b>				
<b>1</b>	<b>PI.01</b>	<b>Rencana Program Pengawasan Intern</b>				
	<b>PI.01.01</b>	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Inspektorat I dan II
	<b>PI.01.02</b>	Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Inspektorat I dan II
	<b>PI.01.03</b>	Rencana Induk Pengawasan (RIP)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Inspektorat I dan II
<b>2</b>	<b>PI.02</b>	<b>Audit</b>				
	<b>PI.02.01</b>	Audit Kinerja/Audit Operasional	Terbatas	Pejabat Pimpinan	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi	Inspektorat I dan II

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	<b>PI.02.02</b>	-		Tinggi Pratama	penyelenggaraan negara	
	<b>PI.02.03</b>	Audit dengan tujuan tertentu	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	In spektorat I dan II
	<b>PI.02.04</b>	Audit internal QMS ISO 9001:2015	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	In spektorat I dan II
<b>3</b>	<b>PI.03</b>	<b>Reviu</b>				
	<b>PI.03.01</b>	Reviu Laporan Keuangan - Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	In spektorat I dan II
	<b>PI.03.02</b>	Reviu RKA-K/L	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	In spektorat I dan II
	<b>PI.03.03</b>	Reviu RKBMN	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	In spektorat I dan II
<b>4</b>	<b>PI.04</b>	<b>Evaluasi AKIP</b>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	In spektorat I dan II
<b>5</b>	<b>PI.05</b>	<b>Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan</b>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	In spektorat I dan II
		Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal - Penyelesaian Kerugian Negara		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal - Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Pemeriksaan Kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan				
<b>6</b>	<b>PI.06</b>	<b>Pengawasan Intern Lainnya</b>				
	<b>PI.06.01</b>	Reformasi Birokrasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	In spektorat I dan II
	<b>PI.06.02</b>	Gratifikasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	In spektorat I dan II
	<b>PI.06.03</b>	Benturan Kepentingan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	In spektorat I dan II
	<b>PI.06.04</b>	Pencegahan Maladministrasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat berkedah pengawasan internal	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat mengakibatkan	In spektorat I dan II

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	<b>PI.06.05</b>	<i>Whistleblowing System</i>	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	kerugian terkait data pribadi 1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	In spektorat I dan II
	<b>PI.06.06</b>	Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) - Tindak Lanjut <i>Monitoring</i> Rekomendasi Hasil Survei bidang pengawasan intern - Pengendalian kecurangan ( <i>Fraud Control Plan-FCP</i> ), pencegahan korupsi, dan pelaksanaan aksi Siranas PK	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	In spektorat I dan II
	<b>PI.06.07</b>	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Manajemen Risiko dan PM-EFITE)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	In spektorat I dan II
	<b>PI.06.08</b>	Kapabilitas AFP (Internal Audit <i>Capability</i> Model - IACM)  Telaah Sejawat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	In spektorat I dan II
	<b>PI.06.09</b>	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) / Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	In spektorat I dan II
	<b>PI.06.10</b>	Konsultasi, Asistensi, Pendampingan Pengawasan Intern	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan	-	In spektorat I dan II

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Tinggi Pratama		

## B. DAFTAR KLASIFIKASI DAN KEAMANAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	RK.01	ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN Penyusunan Rencana Induk - Rencana induk - Dokumen terkait rapat identifikasi kebutuhan - Permintaan/proposal riset	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
2	RK.02	Pelaksanaan Analisis Kebijakan - Instrumen Survei - Surat Perjanjian Kerjasama - Surat tugas dan surat izin - Laporan uji coba	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	- - - Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Laporan hasil analisis kebijakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	pengungkapan secara prematur	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
3	RK.03	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
		- Formulir Hasil survei kepuasan pelanggan - Formulir hasil money				
4	RK.04	<b>Diseminasi</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
		- Materi diseminasi internal - Materi diseminasi eksternal				
		- Laporan hasil diseminasi internal - Laporan hasil diseminasi eksternal				
II	SD	<b>STANDARDISASI</b>				
1	SD.01	<b>Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif</b>				
	SD.01.01	Pengumpulan Data dan Pengkajian Pustaka	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi ONPP, dan Zat Adiktif
	SD.01.02	Penyusunan Rancangan Awal	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi ONPP, dan Zat Adiktif

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	SD.01.03	Pembahasan dengan <i>Stakeholder</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standarisasi ONPP, dan Zat Adiktif
		- Dokumen rapat pembahasan dengan <i>stakeholder</i>				
		- Rancangan hasil pembahasan				
	SD.01.04	Konsultasi Publik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standarisasi ONPP, dan Zat Adiktif
		- Dokumen rapat konsultasi publik				
		- Masukan dari <i>stakeholder</i>				
	SD.01.05	Finalisasi Rancangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standarisasi ONPP, dan Zat Adiktif
		- Dokumen rapat finalisasi rancangan				
		- Rancangan final standar				
	SD.01.06	Persetujuan Rancangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standarisasi ONPP, dan Zat Adiktif
		- <i>Form</i> verbal				
		- Peraturan/ standar/ pedoman/ <i>code of practice</i>				
	SD.01.07	Pengkajian Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Standarisasi ONPP, dan Zat Adiktif
		- Hasil kajian/rekomendasi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	SD.01.08	- Dokumen rapat pembahasan hasil kajian Harmonisasi Standar	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standarisasi ONPP, dan Zat Adiktif
<b>2</b>	<b>SD.02</b>	- Dokumen harmonisasi standar <b>Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (OTSK KOS)</b>				
	<b>SD.02.01</b>	<i>Brainstorming</i> Penyusunan Regulasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standarisasi OTSK KOS
	<b>SD.02.02</b>	Data Hasil Pengkajian Pustaka	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standarisasi OTSK KOS
	<b>SD.02.03</b>	Rancangan Awal Regulasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standarisasi OTSK KOS
	<b>SD.02.04</b>	Hasil Pembahasan dengan <i>Stakeholder</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standarisasi OTSK KOS
	<b>SD.02.05</b>	Pembahasan dengan <i>Stakeholder</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standarisasi OTSK KOS
	<b>SD.02.06</b>	Konsultasi Publik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standarisasi OTSK KOS
	<b>SD.02.07</b>	Finalisasi Rancangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standarisasi OTSK KOS
	<b>SD.02.08</b>	Persetujuan Rancangan	Biasa/Terbuka	Pejabat	-	Direktorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Pimpinan Tinggi Pratama		Standarisasi OTSK KOS
	<b>SD.02.09</b>	Harmonisasi Standar	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standarisasi OTSK KOS
	<b>SD.02.10</b>	Pengkajian Keamanan, Mutu dan Manfaat OTSK KOS	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Standarisasi OTSK KOS
	<b>SD.02.11</b>	<i>Monitoring/Evaluasi Implementasi/Regulatory Impact Assessment (RIA)</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standarisasi OTSK KOS
<b>3</b>	<b>SD.03</b>	<b>Standarisasi Pangan Olahan</b>				
	<b>SD.03.01</b>	Pengumpulan Data dan Pengkajian Pustaka	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
	<b>SD.03.02</b>	Penyusunan Rancangan Awal	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
	<b>SD.03.03</b>	Pembahasan dengan <i>Stakeholder</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
		- Dokumen rapat pembahasan dengan <i>stakeholder</i> - Rancangan hasil pembahasan Konsultasi Publik				
	<b>SD.03.04</b>		Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
		- Dokumen rapat konsultasi publik - Masukan dari <i>stakeholder</i>				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	<b>SD.03.05</b>	Finalisasi Rancangan  - Dokumen rapat finalisasi rancangan - Rancangan final standar Persetujuan Rancangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
	<b>SD.03.06</b>	- Form verbal - Peraturan/ standar/ pedoman/ <i>code of practice/ policy paper</i> (naskah kebijakan) Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
	<b>SD.03.07</b>	- Dokumen rapat pembahasan hasil kajian Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan  - Dokumen permohonan dari stakeholder - hasil kajian - Surat persetujuan/penolakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
	<b>SD.03.08</b>	Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan  - Dokumen permohonan dari stakeholder - hasil kajian - Surat persetujuan/penolakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
	<b>SD.03.09</b>	Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan terkait Fasilitas Standarisasi Keamanan, Mutu, dan Manfaat Pangan Olahan dan Manfaat Pangan Olahan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Standarisasi Pangan Olahan
	<b>SD.03.10</b>	Harmonisasi Standar	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan	-	Direktorat Standarisasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Dokumen harmonisasi Standardisasi Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan - Persiapan penyusunan posisi Indonesia - Laporan hasil keikutsertaan di forum internasional		Tinggi Pratama		Pangan Olahan
III	RG	<b>REGISTRASI</b>				
1	RG.01	<b>Registrasi Obat</b>				
	RG.01.01	Pra Registrasi - Pra registrasi (file yang diunggah pendaftar)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat
	RG.01.02	Proses Evaluasi a. Evaluasi Registrasi Obat baru dan Produk Biologi - registrasi obat baru dan produk biologi (file yang diunggah pendaftar) b. Evaluasi Registrasi Obat pada kondisi khusus (pandemi) - dokumen khasiat keamanan: kajian hasil evaluasi khasiat dan keamanan dan hasil keputusan komite nasional penilai obat - dokumen mutu dan penandaan c. Evaluasi Registrasi Obat Generik - Dokumen mutu dan penandaan - Hasil penilaian in-situ (inspeksi ke sarana produksi obat) d. Proses Uji Bio Ekuivalensi (BE)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat
			Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat
			Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat
			Terbatas	Pejabat	Dapat mengganggu	Direktorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen laporan uji BE</li> <li>- Informasi teknis hasil penilaian laporan uji BE</li> <li>- Nota dinas hasil penilaian laporan uji BE</li> <li>- Surat persetujuan hasil penilaian laporan BE</li> <li>- Surat penolakan hasil uji BE</li> <li>- Informasi teknis hasil pembahasan uji BE</li> </ul>		Pimpinan Tinggi Pratama	kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Registrasi Obat
	<b>RG.01.03</b>	Nomor Izin Edar a. Persetujuan Nomor Izin Edar	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat izin edar (NIE)</li> <li>- Surat Persetujuan Perubahan</li> <li>- Notifikasi</li> <li>a. Data Induk Nomor Izin Edar (NIE)</li> </ul>		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat
	<b>RG.01.04</b>	Pengembalian NIE	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen pengembalian NIE</li> <li>- Dokumen pencabutan/pembatalan NIE</li> <li>- Dokumen pembekuan NIE</li> </ul>				
	<b>RG.01.05</b>	<i>Certificate of Pharmaceutical Product (CPP)</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan	Dapat mengganggu kepentingan	Direktorat Registrasi Obat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Tinggi Pratama	perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
		- <i>Certificate of Pharmaceutical Product (CPP) Indonesia</i>				
		- <i>Certificate of Pharmaceutical Product (CPP) negara lain</i>				
		Persetujuan Pelaksanaan Uji BE				
	<b>RG.01.06</b>	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik dan Obat Pengembangan Baru (OPB)				
		a. Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat
		- Dokumen pengajuan dan progres uji klinik - Hasil kajian - Persetujuan Protokol Uji Klinik - Hasil inspeksi				
		b. Obat Pengembangan Baru (OPB)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat
	<b>RG.01.07</b>	Persetujuan Pemasukan Obat Jalur Khusus ( <i>Special Access Scheme</i> )	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat
		- Dokumen pengajuan SAS - Laporan Deputi / Kepala Badan - Persetujuan SAS				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	<b>RG.01.08</b>	Kajian Khusus Obat, (termasuk kasus)  - Permintaan Kajian - Data referensi terkait isu - Dokumen Pembahasan - Laporan - Hasil kajian - Dokumen hasil evaluasi registrasi obat berupa informasi teknis, hasil evaluasi obat (termasuk dokumen surat komnas dan Uji BE) - Hasil kajian pra registrasi - Kajian khusus obat (masa pandemi) <b>Registrasi OTSK KOS dan Uji Klinik</b>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat
<b>2</b>	<b>RG.02</b> <b>RG.02.01</b>	<b>Registrasi OTSK KOS dan Uji Klinik</b> Registrasi OTSK  a. Penolakan Registrasi - Arsip permohonan (data teknis dan data administrasi); - Surat penolakan/tambahan data; b. Persetujuan Registrasi - Arsip permohonan (data teknis dan data administrasi); - Surat persetujuan registrasi/tambahan data. - Buku konsep nomer OTSK	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi OTSK KOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	<b>RG.02.02</b>	Registrasi Akun Perusahaan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi OTSK KOS
	<b>RG.02.03</b>	Notifikasi Kosmetik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi OTSK KOS
		- Data administrasi ( <i>hardcopy</i> ); - Data teknis (dari sistem) - Data Induk Nomor Izin Edar (NIE)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	
	<b>RG.02.04</b>	Pengembalian NIE	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi OTSK KOS
		- Data Teknis dan Administrasi; - Hasil Pengawasan; - Surat Pembatalan Izin Edar				
	<b>RG.02.05</b>	Permohonan Protokol Uji Praktikum/Uji Klinik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi OTSK KOS
		- Administrasi Protokol Uji Praktikum/Uji Klinik ; - Berkas inspeksi CUKB.				
	<b>RG.02.06</b>	Penilaian Dokumen Informasi Produk	Terbatas	Pejabat	Dapat mengganggu	Direktorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Kosmetik		Pimpinan Tinggi Pratama	kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Registrasi OTSK KOS
		- Berita Acara Penilaian dan Hasil Penilaian DIP; - Surat Tindak lanjut Penilaian DIP; - Berkas CAPA DIP.				
	<b>RG.02.07</b>	Permohonan Rancangan Iklan OTSK	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi OTSK KOS
		- Surat persetujuan - Surat penolakan				
3	<b>RG.03</b>	<b>Registrasi Pangan Olahan</b>				
	<b>RG.03.01</b>	Permohonan Registrasi Baru	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Pangan Olahan
		- Izin Edar Pangan Olahan				
	<b>RG.03.02</b>	Variasi Major	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Pangan Olahan
		- Persetujuan Registrasi Variasi Major				
	<b>RG.03.03</b>	Variasi Minor	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Pangan Olahan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					sehat	
	<b>RG.03.04</b>	- Persetujuan Registrasi Variasi Minor Registrasi Ulang	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Pangan Olahahan
	<b>RG.03.05</b>	Pendaftaran Iklan Pangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Pangan Olahahan
	<b>RG.03.06</b>	Registrasi Akun Perusahaan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Pangan Olahahan
	<b>RG.03.07</b>	- Izin Edar Pangan Olahahan Pencabutan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Pangan Olahahan
		Data Induk Nomor Izin Edar (NIE)	Biasa/Terbuka /Biasa	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Registrasi Pangan Olahahan
<b>IV</b>	<b>PW</b>	<b>PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>				
<b>1</b>	<b>PW.01</b>	<b>Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif</b>				
	<b>PW.01.01</b>	Pelaksanaan Inspeksi Sarana Produksi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari	Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					persaingan usaha tidak sehat	Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
		-Agenda Inspeksi ( <i>Aide Memoire</i> , Surat Tugas) -Laporan Hasil Inspeksi -Surat Tindak Lanjut Hasil Inspeksi -Laporan inspeksi sarana produksi dari BPOM -Laporan dan surat hasil evaluasi CAPA hasil inspeksi				
	<b>PW.01.02</b>	Asistensi Regulatori dan Supervisi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
		-Agenda Inspeksi -Berita Acara Pemeriksaan -Lembar Hasil Inspeksi				
	<b>PW.01.03</b>	Perizinan Sarana Produksi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
		-Izin Usaha Industri farmasi, Bahan Baku Obat, dan Sarana Khusus -SK pencabutan Izin Industri Farmasi -Dokumen yang berhubungan dengan <i>Site Master Plan</i> -Data Sarana Produksi Bahan Baku Obat				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	<b>PW.01.04</b>	Penilaian Pemenuhan CPOB terhadap Sarana Produksi Obat, NPP, Bahan Baku Obat, Sarana Khusus dan Fasilitas Obat Impor  -Sertifikat CPOB/CPBBAOB yang diterbitkan -Sertifikat CPOB/CPBBAOB yang dikembalikan -Persetujuan penggunaan fasilitas bersama -Surat keterangan GMP untuk ekspor -Penilaian dokumen registrasi obat impor terkait pemenuhan CPOB	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
	<b>PW.01.05</b>	Pemeriksaan Balai				
	<b>PW.01.06</b>	Pemeriksaan Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Obat oleh Pusat	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
		- Surat Tugas - Berita Acara Pemeriksaan - Lampiran Dokumen Berita Acara Pemeriksaan - Laporan Hasil Pemeriksaan - Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan - Dokumen <i>Corrective Action Preventive Action</i> (CAPA)				
	<b>PW.01.07</b>	Pemeriksaan Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Obat oleh Pusat	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		terkait dengan kasus/ peristiwa berskala nasional				Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
		- Surat Tugas				
		- Berita Acara Pemeriksaan				
		- Lampiran Dokumen Berita Acara Pemeriksaan				
		- Laporan Hasil Pemeriksaan				
		- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan				
		- Dokumen <i>Corrective Action Preventive Action</i> (CAPA)				
	<b>PW.01.08</b>	<i>Special Access Scheme</i> (SAS)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
		1. Pemeriksaan terkait <i>Special Access Scheme</i> (SAS)				
		- Surat Tugas				
		- Berita Acara Pemeriksaan				
		- Lampiran Dokumen Berita Acara Pemeriksaan				
		- Laporan Hasil Pemeriksaan				
		- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan				
		- Dokumen <i>Corrective Action Preventive Action</i> (CAPA)				
		2. Persetujuan pemasukan obat jalur khusus <i>Special Access Scheme</i> (SAS)				
		3. Dokumen terkait pengawasan peredaran obat secara daring				
		4. Laporan dari fasilitas pengelola obat,				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		bahan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor serta SAS				
	<b>PW.01.09</b>	Penilaian/ Sertifikasi CDOB -Sertifikat CDOB yang diterbitkan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI
		-Surat rekomendasi izin PBF dalam rangka pemenuhan CDOB -Dokumen CAPA	Rahasia Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI
		-Berkas tembusan izin PBF Pusat dari Kementerian Kesehatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor,

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI
		-Berkas tembusan rekomendasi izin PBF cabang dari Balai Besar/Balai POM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI
	<b>PW.01.10</b>	Pengawasan Sarana Pelayanan Obat Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI
		- Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari BB/BPOM terkait sarana pelayanan dan kefarmasian				
		- Laporan hasil pengawasan penjualan <i>online</i>				
		- Laporan hasil evaluasi CAPA				
		- Laporan kajian sarana pelayanan dan kefarmasian				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Laporan Bimbingan Teknis CDOOB - Dokumen terkait <i>Pilot Project</i> - Dokumen terkait Barang bukti tindak pidana - Laporan Psikotropika, Narkotika, dan Prekursor - Surat pemberhentian sementara - Surat pencabutan izin edar - Surat peringatan keras - Laporan pembinaan PKM				
	<b>PW.01.11</b>	Pengawasan Keamanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor  - Laporan Kejadian tidak diinginkan / Efek Samping Obat (KTD/ESO) dari tenaga kesehatan - Laporan farmakovigilans dari pemilik izin edar /EUA - Kajian farmakovigilans - Dokumen inspeksi farmakovigilans	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan KMEI ONAPPZA
	<b>PW.01.12</b>	Pengawasan Mutu Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor  <b>1. Rancangan Final Pedoman Sampling dan Pengujian ONPPZA</b> - Dokumen Forum Koordinasi Pusat dan UPT dalam Perencanaan Sampling dan Pengujian ONPPZA	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan KMEI ONAPPZA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Dokumen Penyusunan Rancangan pedoman Sampling dan Pengujian ONPPZA				
		<b>2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sampling dan Pengujian</b>				
		- Laporan hasil sampling				
		- Laporan hasil pengujian				
		- Dokumen evaluasi perubahan perencanaan sampling				
		- Dokumen evaluasi sampling dan pengujian				
		<b>3. Tindak Lanjut Pengawasan Obat TMS</b>				
		- Dokumen Tindak Lanjut Obat TMS				
		- Surat Penarikan dan/atau sanksi terkait obat TMS				
		- Laporan <i>Monitoring</i> Penarikan Obat TMS				
		- Dokumen Evaluasi Tindak Lanjut Penarikan Obat TMS dari Industri Farmasi				
		<b>4. Dokumen Tindak Lanjut terkait kasus mutu obat</b>				
		- Dokumen Tindak Lanjut terkait kasus mutu obat				
		- Surat Penarikan dan/atau sanksi terkait kasus mutu obat				
		- Laporan <i>Monitoring</i> Penarikan kasus mutu obat				
		- Dokumen Evaluasi Tindak Lanjut Penarikan kasus mutu obat dari Industri Farmasi				
		- Dokumen Publikasi terkait kasus mutu obat				
		<b>5. Dokumen kerja sama terkait pengawasan mutu obat</b>				
		- Dokumen MoU, PKS, dan/atau NDA				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PW.01.13	-Dokumen implementasi kerja sama Pengawasan Promosi dan Informasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI
		- Surat Respon ke BB/Balai POM				
		- Surat Tindak Lanjut Pelanggaran Iklan Obat kepada Industri Farmasi				
		- Surat Tanggapan atas Respon Industri				
		- Surat Rekomendasi Penutupan Situs Internet kepada Kemenkominfo				
		- Surat Tindak Lanjut Pelanggaran Promosi /Iklan Obat pada Media Internet kepada Pemilik Situs				
		- Surat Tanggapan Pemilik Situs Internet				
		- Surat Permintaan Normalisasi Situs Internet kepada Kemenkominfo				
		- Dokumen Pengawasan promosi/iklan obat sebelum dipublikasikan				
		- Dokumen Pengawasan promosi/iklan obat setelah dipublikasikan				
		- Laporan pengaduan masyarakat terkait iklan obat				
		- Dokumen Pengawasan penandaan obat beredar (surat respon ke BB/Balai POM, Tindak Lanjut dan Tanggapan ke industri				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		farmasi) - Laporan evaluasi kemasan siap edar - Laporan pembinaan dalam rangka peningkatan kepatuhan pemenuhan iklan dan penandaan obat ke industri farmasi				
		- Dokumen rekomendasi penutupan situs internet dan permintaan normalisasi situs internet kepada Kemenkominfo - Dokumen tindak lanjut pelanggaran dan tanggapan promosi iklan obat pada media internet kepada pemilik situs				
	<b>PW.01.14</b>	Pengawasan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan KMEI ONAPFZA
		<b>1. Perizinan dalam pengawasan Ekspor Impor Obat dan NPP</b>				
		- Surat Keterangan Impor (SKI) - Permohonan Web Reg/SKI Manual - Tembusan Surat SAS ( <i>Special Access Scheme</i> ) dari Direktorat Registrasi Obat				
		- Rekomendasi Persetujuan Impor Obat sebagai Barang Komplementer - Rekomendasi Importir Produsen Bahan Berbahaya untuk Obat				
		- Sertifikat Analisa Hasil Pengawasan (AHP) Narkotika, Psikotropika dan Prekursor				
		<b>2. Pengawasan terhadap produk dan sarana dalam rangka verifikasi data realisasi impor dan ekspor Obat dan NPP</b>				
		- Laporan tindak lanjut dan/atau Berita				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Acara Sampling Vaksin/Verifikasi Vaksin -Laporan tindak lanjut dan Berita Acara Pemeriksaan Sarana				
		<b>3. Sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pengawasan Ekspor Obat dan NPP</b> -Laporan sosialisasi -Data peserta sosialisasi -Data materi dan pelaksanaan				
	<b>PW.01.15</b>	Pengawasan Produk Tembakau	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan KMEI ONAPPZA
		<b>1. Pengawasan Promosi/Iklan Produk Tembakau</b> - Laporan Pengawasan Promosi/Iklan Produk Tembakau - Surat Tindak Lanjut Pelanggaran Promosi/Iklan Produk Tembakau kepada Industri Rokok - Surat Tindak Lanjut Rekomendasi terkait Pelanggaran Promosi/Iklan Produk Tembakau kepada Instansi terkait				
		<b>2. Pengawasan Label Produk Tembakau</b> - Laporan Pengawasan Label Produk Tembakau - Laporan Hasil Pengujian Kandungan Nikotin dan Tar dari Laboratorium Pengujian Badan POM - Laporan Contoh Kemasan Produk Tembakau dari Produsen - Laporan Hasil Pengujian Kandungan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Nikotin dan Tar dari Produsen - Surat Tindak Lanjut Pelanggaran Label Produk Tembakau kepada Industri Rokok/Impor-tir - Surat Tindak Lanjut Rekomendasi terkait Pelanggaran Label Produk Tembakau kepada Instansi terkait				
		<b>3. Lain-lain</b> - Laporan Kajian Pengawasan Produk Tembakau - Laporan Hasil Pemeriksaan Sarana dan Berita Acara Pemeriksaan Sarana (BAP Rokok) - Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sarana Rokok - <i>Proceeding</i> Hasil Pengawasan Rokok - Dokumen KIE				
<b>2</b>	<b>PW.02</b>	<b>Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan</b>				
	<b>PW.02.01</b>	Penilaian Sarana  - Surat tugas; - <i>Aide memoire</i> ; - Rencana inspeksi; - Daftar Hadir; - Agenda Inspeksi; - Berita Acara Pemeriksaan; - Surat Tindak Lanjut Hasil Inspeksi dan Laporan Hasil Inspeksi;	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan OTSK

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Evaluasi/ <i>Closed</i> CAPA</li> <li>- Sertifikat CPOTB</li> <li>- Sertifikat CPOTB Bertahap</li> <li>- Surat Evaluasi dan/ atau Rekomendasi Denah/ Rencana Induk Pembangunan (RIP)/ Sistem Tata Udara (STU)</li> <li>- Surat Evaluasi dan/ atau Persetujuan Penggunaan Bersama Fasilitas OT dan Non OT</li> </ul>				
	<b>PW.02.02</b>	Inspeksi Sarana - Laporan Rutin hasil inspeksi dari UPT BPOM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan OTSK
		Dokumen Pemeriksaan Rutin : - Surat Tugas - Rencana Inspeksi - <i>Aide Memoire</i> - Agenda Inspeksi - Daftar Hadir - Berita Acara Pemeriksaan - Berita Acara Pengambilan Contoh/Sampling - Berita Acara Pengamanan Setempat/ Produk Dalam Pengawasan Badan POM - Berita Acara Pemusnahan - Berita Acara Penolakan  Tindak lanjut hasil inspeksi Rutin : - Laporan Hasil Inspeksi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Surat Tindak Lanjut/ Evaluasi/ <i>Closed</i> CAPA - Surat Peringatan CAPA I, II dan Peringatan Keras. Dokumen Pemeriksaan Kasus	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan OTSK
		- Surat Tugas - Rencana Inspeksi - Aide Memoire - Agenda Inspeksi - Daftar Hadir - Berita Acara Pemeriksaan - Berita Acara Pengambilan Contoh/Sampling - Berita Acara Pengamanan Setempat/Produk Dalam Pengawasan Badan POM - Berita Acara Pemusnahan - Berita Acara Penolakan  Tindak lanjut hasil inspeksi Kasus : - Berita Acara Hasil Inspeksi - Laporan Hasil Inspeksi - Tindak lanjut hasil inspeksi - Surat Tindak Lanjut/ Evaluasi/ <i>Closed</i> CAPA - Surat Peringatan CAPA I, II dan Peringatan Keras. Pengawasan Informasi dan Promosi	Terbatas	Pejabat	Dapat mengganggu	Direktorat
	<b>PW.02.03</b>					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan Informasi Label/Kemasan;</li> <li>- Laporan Bulanan pengawasan penandaan produk OT dan SK UPT Badan POM;</li> <li>- Surat tindak lanjut hasil pengawasan informasi.</li> <li>- <b>Evaluasi laporan pengawasan penandaan produk OT dan SK</b></li> <li>b. Pengawasan promosi:</li> <li>- Laporan Bulanan hasil pengawasan promosi/iklan dari UPT Badan POM;</li> <li>- Surat tindak lanjut hasil pengawasan promosi/iklan;</li> <li>- Evaluasi bulanan Laporan Pengawasan Promosi/Iklan produk OT dan SK</li> </ul>		Pimpinan Tinggi Pratama	kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pengawasan OTSK
	<b>PW.02.04</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan Keamanan dan Mutu</li> </ul>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan OTSK
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan Keamanan:</li> <li>a. Tindak lanjut temuan produk OT dan SK terkait TIE, BKO, pemalsuan dan kasus lainnya</li> <li>b. Tindak lanjut laporan pengaduan</li> <li>c. Surveillance dan analisis resiko</li> <li>- Laporan efek samping OTSK (ESOTSK)</li> <li>- Kajian ESOTSK</li> <li>- Tindak lanjut ESOTSK</li> </ul>				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		d. Tindak lanjut laporan keamanan dari Badan Otoritas Negara Lain Pengawasan mutu : a. Dokumen permohonan surat keterangan impor dan ekspor b. Surat keterangan impor dan ekspor c. Pemantauan pelaksanaan dan evaluasi sampling dari BBPOM/BPOM d. Laporan Bulanan Hasil Sampling e. <b>Tindak lanjut hasil sampling dan pengujian produk OT dan SK</b> f. Pedoman prioritas sampling g. Evaluasi hasil pengujian OTSK BBPOM/BPOM h. Evaluasi hasil pengujian OTSK P3OMN/BBPOM i. Laporan pengujian OTSK k. Tindak lanjut dan tanggapan pengujian l. <i>Public warning</i> m. <b>Laporan bulanan hasil sampling dan pengujian produk OT dan SK</b> o. Tindak lanjut tanggapan dan pengujian				
3	PW.03 PW.03.01	<b>Pengawasan Kosmetik</b> Penilaian Sarana	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Kosmetik
		- Sertifikat/surat penerapan CPKB - Surat evaluasi/persetujuan denah - Surat keterangan fasilitas bersama. Inspeksi Sarana	Terbatas	Pejabat	Dapat mengganggu	Direktorat
	PW.03.02					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Pimpinan Tinggi Pratama	kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pengawasan Kosmetik
		- Laporan Bulanan hasil Inspeksi dari balai; - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Inspeksi, tindak lanjut hasil inspeksi dan dokumen hasil evaluasi CAPA - Laporan Pengawasan Kastus Target Pengawasan Informasi dan Promosi BB/BPOM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Kosmetik
	<b>PW.03.04</b>	Surat edaran target pengawasan promosi/iklan kosmetik BB/BPOM Target Pengawasan Informasi dan Promosi pada Sarana Produksi/distribusi Kosmetik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Kosmetik
	<b>PW.03.05</b>	- Daftar target pemeriksaan promosi/ iklan dan informasi/ label kosmetik di sarana produksi/ distribusi kosmetik Evaluasi Promosi/Iklan Kosmetik Tabel rekapitulasi hasil evaluasi promosi/iklan kosmetik - Tabel produk kosmetik berupa TMK/MK	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Kosmetik

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi penandaan</li> <li>- Tabel produk kosmetik berupa MS/TMS</li> <li>- Laporan bulanan promosi atau iklan dan informasi atau label</li> <li>- Surat <i>feedback</i> ke BB/BPOM seluruh Indonesia atau surat peringatan ke pemilik notifikasi atau Nota Rekomendasi tindak lanjut ke unit atau instansi terkait</li> <li>- CAPA</li> </ul>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Kosmetik
	<b>PW.03.06</b>	Evaluasi Informasi/Label Kosmetik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Kosmetik
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabel rekapitulasi hasil evaluasi informasi/label kosmetik</li> </ul>				
	<b>PW.03.07</b>	Verifikasi Laporan Bulanan pengawasan promosi/iklan dan informasi/label kosmetik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Kosmetik
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan bulanan pengawasan iklan dan penandaan dari BB/BPOM di seluruh Indonesia</li> <li>- Surat klarifikasi kepada BB/BPOM bila ada laporan bulanan yang tidak lengkap agar melengkapi laporan bulanan</li> <li>- Hasil verifikasi terhadap temuan pelanggaran iklan kosmetik</li> <li>- Hasil verifikasi terhadap kesimpulan hasil evaluasi iklan atau penandaan kosmetika</li> <li>- Tabel produk promosi/iklan MK/TMK dan</li> </ul>				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	<b>PW.03.08</b>	Informasi/label kosmetik MS/TMS Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Promosi/Iklan dan Informasi/Label Kosmetik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Kosmetik
	<b>PW.03.09</b>	Surat tindak lanjut dan/atau rekomendasi ke unit/instansi lain berupa: - Surat <i>feedback</i> ke BB/BPOM seluruh Indonesia - Surat peringatan ke pemilik notifikasi - Nota Rekomendasi tindak lanjut ke unit atau instansi terkait Pemantauan dan Pendataan TLHP Promosi/Iklan dan Informasi/Label Kosmetik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Kosmetik
	<b>PW.03.10</b>	Pengawasan Efek Samping dan Mutu Kandungan Produk  - Ceklis <i>monitoring</i> kosmetovigilans dan dalam dan luar negeri - Hasil evaluasi kelengkapan data laporan data efek samping - Laporan hasil evaluasi - Tindak lanjut	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Kosmetik
	<b>PW.03.11</b>	Pengawasan Mutu Ekspor Impor	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari	Direktorat Pengawasan Kosmetik

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan izin SAS (<i>Special Access Scheme</i>) termasuk bukti bayarnya, rekomendasi persetujuan impor, rekomendasi IP-B2</li> <li>- Hasil evaluasi permohonan izin SAS (<i>Special Access Scheme</i>), rekomendasi persetujuan impor, rekomendasi IP-B2</li> <li>- Surat keterangan ekspor termasuk bukti bayarnya, izin SAS (<i>Special Access Scheme</i>), rekomendasi persetujuan impor,</li> <li>- Dokumen verifikasi teknis dalam rangka permohonan teknis</li> <li>- Berita Acara Pemeriksaan</li> <li>- Berita Acara Pengambilan Sampel</li> <li>- Tindak lanjut sampling</li> <li>- Hasil CoA</li> <li>- Laporan kegiatan layanan publik SKI / SKE</li> <li>- Formulir Layanan Informasi dan Pengaduan</li> </ul>			persaingan usaha tidak sehat	
	<b>PW.03.12</b>	Sampling dan Pengujian Kosmetik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Kosmetik
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Sampling dari BBPOM / BPOM</li> <li>- Laporan Bulanan Hasil Sampling</li> <li>- Tindak lanjut hasil sampling</li> <li>- Pedoman prioritas sampling</li> </ul>				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Berkas evaluasi hasil pengujian Kosmetik BBPOM/BPOM - Laporan bulanan pengujian - Laporan Kosmetika TMS - Tindak Lanjut tanggapan dan pengujian				
		Berkas evaluasi hasil pengujian Kosmetik P3OMN/BBPOM - Laporan pengujian Kosmetik - Laporan hasil verifikasi/ uji absah/ uji rujukan - <i>Public warning</i> - Laporan bulanan pengujian - Laporan Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat - Tindak lanjut tanggapan dan pengujian				
4	<b>PW.04</b>	<b>Pengawasan Pangan Olahan</b>				
	<b>PW.04.01</b>	Pengawasan Sarana Produksi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
		- Surat Tugas - Dokumen hasil pemeriksaan sarana produksi (Laporan, Berita acara pemeriksaan dan form pemeriksaan)				
	<b>PW.04.02</b>	Pengawasan Sarana Distribusi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					sehat	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
		- Surat Tugas				
		- Dokumen hasil pemeriksaan sarana distribusi (Laporan, Berita acara pemeriksaan dan form pemeriksaan)				
		- Dokumen tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi				
	<b>PW.04.03</b>	Pengawasan Produk Pangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
		- Laporan pengujian pangan				
		- Dokumen tindak lanjut hasil pengujian pangan				
	<b>PW.04.04</b>	Pengawasan Label Pangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
		- Laporan pengawasan label pangan				
		- Dokumen tindak lanjut pengawasan label pangan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	<b>PW.04.05</b>	Pengawasan Iklan Pangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
		- Laporan pengawasan iklan pangan - Dokumen tindak lanjut pengawasan iklan pangan				
	<b>PW.04.06</b>	Pengawasan Ekspor dan Impor Pangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
		- Dokumen permohonan surat keterangan ekspor - Dokumen permohonan surat keterangan impor - Dokumen permohonan rekomendasi pemasukan pangan olahan asal hewan - Surat keterangan ekspor - Surat keterangan impor - Surat rekomendasi pemasukan pangan olahan asal hewan				
	<b>PW.04.07</b>	Pengawasan Kemasan Pangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Laporan pengawasan kemasan pangan - Dokumen tindak lanjut pengawasan kemasan pangan			persaingan usaha tidak sehat	Olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
	<b>PW.04.08</b>	Penanganan Kasus Pangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
		- Dokumen penanganan Kejadian Luar Biasa - Dokumen INRASFF (Indonesia <i>Rapid Alert System for Food and Feed</i> ) - Dokumen penanganan pengaduan konsumen - Dokumen penanganan kasus lainnya				
	<b>PW.04.09</b>	Sertifikasi Pangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
		- Dokumen permohonan verifikasi program				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		manajemen risiko - Dokumen hasil verifikasi program manajemen risiko - Dokumen sidang komisi program manajemen risiko - Piagam program manajemen risiko - Dokumen permohonan sertifikasi cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) - Dokumen hasil audit CPPOB - Sertifikat CPPOB				
	<b>PW.04.10</b>	Pengawasan Bahan Berbahaya	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
		- Laporan pengawasan bahan berbahaya - Dokumen tindak lanjut hasil pengawasan bahan berbahaya				
<b>V</b>	<b>PM</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA</b>				
	<b>PM.01</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>				
<b>1</b>	<b>PM.01.01</b>	Peningkatan Peran Pemerintah Daerah	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan kerahasiaan data advokasi	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos, Balai Besar/Balai.

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Laporan advokasi pemerintah daerah - laporan advokasi lintas sektor				LOKA
<b>2</b>	<b>PM.01.02</b>	Pemberdayaan Komunitas Sosial dan Kemasyarakatan	Terbatas		Terkait dengan kerahasiaan data advokasi	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Laporan Pembentukan Duta - Laporan Pembentukan Kader - Laporan KIE				
<b>3</b>	<b>PM.01.03</b>	Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	Terbatas		Terkait dengan kerahasiaan data advokasi	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Laporan Pendampingan - Laporan Pelatihan TOT - Database Fasilitator				
<b>4</b>	<b>PM.01.04</b>	Pendampingan Pengembangan Bahan Alam Kosmetik	Terbatas		Terkait dengan kerahasiaan data advokasi	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Laporan Pendampingan - Laporan Pelatihan TOT				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
5	PM.01.05	- Database Fasilitator - Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kosmetik	Terbatas		Terkait dengan kerahasiaan data advokasi	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Laporan Pendampingan - Laporan Pelatihan TOT - Database Fasilitator				
	PM.02	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN</b>				
1	PM.02.01	<b>Advokasi Pangan</b>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
		- Laporan Advokasi Pemerintah Daerah - Laporan Advokasi Lintas Sektor - Laporan Advokasi Komunitas Pendidikan - Laporan Advokasi Ormas - Laporan Advokasi Asosiasi				
		Asistensi Regulasi				
2	PM.02.02		Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
		Laporan Asistensi Laporan Hasil Kajian Dokumen Database penerbitan SPPIRT (sertifikat penyuluhan pangan industri				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3	PM.02.03	rumah tangga) <b>Pendampingan Usaha</b>		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama		Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
		a. Pendampingan UMKM	Terbatas		-	
		- Hasil Uji Sarana Produksi	Biasa/Terbuka		-	
		- Laporan Pendampingan	Biasa/Terbuka		-	
		- Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan	Terbatas		Dapat mengganggu kepentingan dari persaingan usaha tidak sehat	
		- Database Fasilitator UMKM			-	
		- Laporan Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama		
		b. Pendampingan Usaha Ritel				
		- Laporan Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama		Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
		- Laporan Pelatihan TOT	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama		Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
		- Database Fasilitator/Kader	Terbatas	Pejabat Pimpinan	Dapat mengganggu kepentingan	Direktorat Pemberdayaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Tinggi Pratama	perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahahan
		- Hasil Uji Sampling	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahahan
4	PM.02.04	<b>Peningkatan Kapasitas Pengetahuan, Sikap, Perilaku, dan Keterampilan Keamanan Pangan</b> a. Bimtek dan Pelatihan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahahan
		- Laporan Bimtek dan Pelatihan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	
		- Database Peserta Bimtek dan Pelatihan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	
		- Database Materi Bimtek dan Pelatihan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	
		b. Sosialisasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahahan
		- Laporan Sosialisasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Database Peserta Sosialisasi	Terbatas	Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	
		- Database Materi Sosialisasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	
		- Laporan Pameran	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	
		c. Produk Informasi Keamanan Pangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
		- Database Produk				
		- Database Distribusi				
		d. Aplikasi Keamanan Pangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
<b>VI</b>	<b>PD</b>	<b>PENINDAKAN</b>				
1	<b>PD.01</b>	<b>CEGAH TANGKAL</b>				
	<b>PD.01.01</b>	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				
		Pedoman Cegah Tangkal	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Cegah Tangkal
		- Pedoman Cegah Tangkal beserta verbalnya				
		- Nota dinas laporan kegiatan penyusunan pedoman				
		- Surat penyampaian pedoman				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Notulensi pembahasan penyusunan pedoman Dokumen Kajian trend/ analisis Kejahatan Obat dan Makanan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Direktorat Cegah Tangkal
		- Laporan hasil pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyusunan analisis kejahatan obat dan makanan - Surat Tugas pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyusunan analisis kejahatan obat dan makanan Dokumen Kegiatan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Direktorat Cegah Tangkal
		- Kerangka Acuan Kegiatan - Laporan Kegiatan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat - Grand Design Kegiatan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat Peta Rawan Kasus Dokumen Petunjuk Teknis Pengisian Data Rawan Kasus	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Cegah Tangkal
	<b>PD.01.02</b>	Hasil Analisis Verifikasi Data Rawan Kasus	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya	Direktorat Cegah Tangkal

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Analisis Kerawanan per Komoditi - Analisis Kejahatan Obat dan Makanan Tahunan UPT			pengingkapan secara prematur	
	<b>PD.01.03</b>	Penggalangan <i>Stakeholders</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengingkapan secara prematur	Direktorat Cegah Tangkal
		- Kerangka Acuan Kegiatan - Laporan pelaksanaan kegiatan penggalangan pelaku usaha - surat undangan kegiatan penggalangan pelaku usaha - surat tugas kegiatan penggalangan pelaku usaha - survei/ kuesioner/ evaluasi/ kegiatan penggalangan pelaku usaha				
<b>2</b>	<b>PD.02</b> <b>PD.02.01</b>	Penyusunan Informasi Intelijen Dasar/ <i>Basic Descriptive Intelligence (BDI)</i>	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengingkapan secara prematur 2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
	<b>PD.02.02</b>	Kegiatan Intelijen	Rahasia	Pejabat	1. Dapat menghambat	Direktorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Pimpinan Tinggi Madya	penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematif 2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Intelijen Obat dan Makanan
	<b>PD.02.03</b>	- Laporan Informasi Rencana Operasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1. Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematif 2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
	<b>PD.02.04</b>	Operasi Intelijen - Laporan Intelijen	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematif 2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	
	<b>PD.02.05</b>	Analisa dan Perkiraan Intelijen	Rahasia	Pejabat	1. Dapat menghambat	Direktorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3	<b>PD.03</b> <b>PD.03.01</b>	Penyidikan Pendalaman Informasi Tindak Pidana		Pimpinan Tinggi Madya	penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematut 2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Intelijen Obat dan Makanan
	<b>PD.03.02</b>	- Laporan Pendalaman Informasi Operasi Penyidikan	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
		- Laporan Operasi Penyidikan - Laporan Kemajuan Penyidikan Pusat - Laporan Kemajuan Penyidikan UPT BPOM - Laporan pemuasaan barang bukti	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
	<b>PD.03.03</b>	Pembuatan Berkas Perkara	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
		- Berkas Perkara - Surat P 19				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Surat P.21 - Dokumen Penyerahan Barang Bukti dan Tersangka (Tahap II) - Putusan Hakim				
4	PD.04 PD.04.01	<b>SIBER</b> <b>Pemantauan Peredaran Obat dan Makanan Melalui Siber</b> Laporan hasil patroli siber	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau administratif 1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau administratif	Direktorat Siber Obat dan Makanan
		Nota dinas pengajuan <i>profiling</i>	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau administratif	
		Surat dinas pengajuan <i>takedown</i>	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau administratif	
		Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi	Rahasia	Pejabat	Terkait dengan bahaya	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				Pimpinan Tinggi Madya	yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	
		Laporan analisis dan evaluasi	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	
	<b>PD.04.02</b>	<b>Penyusunan profil pelanggaran/kejahatan obat dan makanan di ranah siber</b> - Rekomendasi tidak lanjut <i>profiling</i> produk berpotensi menyebabkan kerugian besar. (hak akses Rahasia)	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau administratif	Direktorat Siber Obat dan Makanan
			Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama		
		Permohonan data akun	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau administratif	
	<b>PD.04.03</b>	<b>Analisis Digital Forensik</b>				Direktorat Siber Obat dan Makanan
		Berita acara serah terima barang bukti	Rahasia	Pejabat	1. Dapat menghambat	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		peralatan elektronik		Pimpinan Tinggi Madya	proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau administrative 2. Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	
		Berita acara pengembalian barang bukti peralatan elektronik	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau administrative 2. Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	
		Laporan hasil analisis digital forensik	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau administrative 2. Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	
		Laporan evaluasi hasil analisis digital forensik	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
VII	PP	<b>PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL</b>			pidana dan/atau administrative 2. Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	
1	PP.01 PP.01.01	<b>Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan</b> Kegiatan Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
		a. Kegiatan Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan di PPPOMN - Surat Permohonan Pengujian - CoA ( <i>Certificate of Analysis</i> ) - Formulir Penerimaan Sampel - Formulir Kaji Ulang Permintaan Pengujian - Formulir Kartu Kendali Sampel - Formulir Ketidaksesuaian Sampel - Formulir Pengendalian Pekerjaan yang tidak sesuai - Lembar Disposisi - Formulir Pelayanan - Buku Besar Sampel ( <i>Soft/hard copy</i> )				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Ekspedisi sampel</li> <li>- Buku Ekspedisi Ka. P3OMN</li> <li>- Buku Ekspedisi Sertifikat/Laporan Pengujian</li> <li>- Buku Ekspedisi Internal R. Sampel</li> <li>- Buku Ekspedisi BB/BPOM</li> <li>- Buku Ekspedisi Internal BPOM</li> <li>- Buku Ekspedisi Arsip Sertifikat/Laporan Pengujian</li> <li>- Surat Perintah Kerja</li> <li>- Surat Perintah Uji</li> <li>- Surat Perintah Pengujian</li> <li>- Formulir Catatan Pengujian</li> <li>- Formulir Lampiran Catatan Pengujian</li> <li>- Formulir Laporan Hasil Uji</li> <li>- Formulir Konsep Sertifikat/Laporan Pengujian</li> <li>- Sertifikat/Laporan Pengujian</li> <li>- Suplemen Sertifikat/Laporan Pengujian</li> <li>- Amandemen Sertifikat/Laporan Pengujian</li> <li>- Surat Pengantar Sertifikat/Laporan Pengujian</li> </ul>				
	<b>PP.01.02</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Kegiatan Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan di UPT BPOM</li> <li>Tanggapan Hasil Pengujian BB/BPOM/Uji Absah</li> </ul>	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>2. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara</li> </ol>	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMAWAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Permohonan Uji Absah</li> <li>- CoA (<i>Certificate of Analysis</i>)</li> <li>- Formulir Penerimaan Sampel</li> <li>- Formulir Kaji Ulang Permintaan Pengujian</li> <li>- Formulir Kartu Kendali Sampel</li> <li>- Formulir Ketidaksiasaan Sampel</li> <li>- Formulir Pengendalian Pekerjaan yang tidak sesuai</li> <li>- Lembar Disposisi</li> <li>- Formulir Pelayanan</li> <li>- Buku Besar Sampel (<i>Soft/hard copy</i>)</li> <li>- Buku Ekspedisi sampel</li> <li>- Buku Ekspedisi Ka. P3OMN</li> <li>- Buku Ekspedisi Sertifikat/Laporan Pengujian</li> <li>- Buku Ekspedisi Internal R. Sampel</li> <li>- Buku Ekspedisi BB/BPOM</li> <li>- Buku Ekspedisi Internal BPOM</li> <li>- Buku Ekspedisi Arsip Sertifikat/Laporan Pengujian</li> <li>- Surat Perintah Kerja</li> <li>- Surat Perintah Uji</li> <li>- Surat Perintah Pengujian</li> <li>- Formulir Catatan Pengujian</li> <li>- Formulir Lampiran Catatan Pengujian</li> <li>- Formulir Laporan Hasil Uji</li> <li>- Formulir Konsep Sertifikat/Laporan Pengujian</li> <li>- Laporan Tanggapan Hasil Uji TMS BB/BPOM</li> <li>- Suplemen Sertifikat/Laporan Pengujian</li> <li>- Amandemen Sertifikat/Laporan Pengujian</li> </ul>				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2	PP.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pengantar Sertifikat/Laporan Pengujian</li> <li><b>Pengembangan Metode Analisis (Validasi/Verifikasi) dan Uji Kolaborasi</b></li> <li>- Surat Permintaan usulan Judul Metode Analisis ke Bidang bidang</li> <li>- Surat Usulan permintaan / judul MA ke DitWas Kedeputian</li> <li>- Dokumen perencanaan kegiatan pembuatan MA (POA)</li> <li>- Surat permintaan TIM Metode Analisa</li> <li>- SK Penetapan TIM Metode Analisa</li> <li>- Surat Permintaan usulan pengadaan reagen /media dan alat fungsional lainnya</li> <li>- Surat pemberitahuan uji kolaborasi ke UPT BPOM</li> <li>- Surat permintaan tim ahli MA</li> <li>- Undangan pembahasan MA</li> <li>- Daftar Hadir pembahasan MA</li> <li>- Notulensi pembahasan</li> <li>- Draft Naskah Validasi MA</li> <li>- Buku naskah validasi MA</li> <li>- Surat pengiriman buku MA ke UPT/ Unit BPOM</li> <li>- Surat undangan Sosialisasi MA</li> <li>- Daftar Hadir</li> <li>- Notulensi sosialisasi</li> <li>- Metode Analisis</li> </ul>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara.	
3	PP.03	<b>Pengembangan dan Distribusi Baku Pemandang</b>				
	PP.03.01	Pengembangan Baku Pemandang	Rahasia	Pejabat	Dapat mengakibatkan	Pusat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMAWAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Permintaan Usulan Calon Baku Pemandang</li> <li>- Surat Undangan Rapat Koordinasi</li> <li>- Daftar hadir/peserta</li> <li>- Notulensi</li> <li>- Data Baku Pemandang yang akan dikembangkan</li> <li>- SPK</li> <li>- Formulir uji pendahuluan dalam rangka pengembangan BP kimia</li> <li>- CP/LCP</li> <li>- Surat Pengantar Uji Kolaborasi, Protokol dan Evaluasi Hasil Uji Kolaborasi</li> <li>- Surat Undangan Pembahasan Baku Pemandang</li> <li>- Daftar Hadir/peserta Pembahasan Baku Pemandang</li> <li>- Notulensi Pembahasan Baku Pemandang</li> <li>- Laporan dan Sertifikat Analisis Baku Pemandang</li> </ul>		Pimpinan Tinggi Madya	terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
	<b>PP.03.02</b>	Pengelolaan dan Distribusi Baku Pemandang untuk Internal BPOM	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
	<b>PP.03.03</b>	Distribusi baku pemandang untuk eksternal	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Surat Permintaan Baku Pembanding dari Eksternal - Surat Perintah Bayar (SPB) - Berita Acara Serah Terima Baku Pembanding untuk PNBP				
4	PP.04	<b>Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian</b>				
	PP.04.01	Kegiatan Kalibrasi di Internal BPOM  - Surat permintaan jadwal rencana kalibrasi periode tahunan - Surat konfirmasi persetujuan kalibrasi - Daftar alat yang akan dikalibrasi - Form persetujuan membawa alat kalibrator - Surat tugas - Formulir evaluasi pelaksanaan kalibrasi - Lembar hasil pengamatan - Lampiran hasil kalibrasi - Sertifikat kalibrasi - Formulir penerimaan hasil kalibrasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
	PP.04.02	Kegiatan Kalibrasi di Eksternal BPOM  - Surat Permohonan Kalibrasi - Surat Penawaran Harga Kalibrasi - Surat Perintah Bayar (SPB)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMAWAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
5	PP.05 PP.05.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Tugas</li> <li>- Formulir evaluasi pelaksanaan Kalibrasi</li> <li>- Lembar hasil pengamatan</li> <li>- Lampiran hasil Kalibrasi</li> <li>- Sertifikat Kalibrasi</li> <li>- Formulir penerimaan hasil Kalibrasi</li> </ul> <p><b>Penyediaan Hewan Uji/Baku Mikroba</b> Kegiatan Pengembangbiakan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Hewan Uji Baku Mikroba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen rencana kegiatan pengadaan hewan uji dan baku mikroba</li> <li>- Surat permintaan pembelian / pengadaan hewan, pakan hewan, bedding, Obat hewan alat fungsional lainnya, dan perbaikan sarana prasarana,</li> <li>- Surat Pemberitahuan kegiatan lembur</li> <li>- Surat Perintah Kerja</li> <li>- Surat Perintah Pengerjaan</li> <li>- Dokumen/ Formulir - formulir yang berhubungan dengan pembiakan , pemeliharaan dan pengelolaan hewan uji</li> <li>- Dokumen pemeliharaan baku mikroba</li> <li>- Stock opname hewan uji (aplikasi / <i>softcopy</i>)</li> <li>- stock opname pakan hewan (aplikasi / <i>softcopy</i>)</li> </ul>	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
	PP.05.02	Kegiatan Pengembangbiakan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Hewan Uji Baku Mikroba	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Pusat Pengembangan Pengujian Obat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH dan Makanan Nasional
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir permintaan dan penyerahan hewan percobaan</li> <li>- Formulir permintaan dan penyerahan pakan hewan</li> <li>- Surat permintaan pembelian hewan uji/baku mikroba</li> <li>- Surat Perintah Bayar (SPB)</li> <li>- Lembar bukti pembayaran dari bank</li> <li>- Lembar SIMPONI</li> <li>- Formulir penyerahan hewan percobaan kepada pelanggan eksternal</li> <li>- Surat keterangan sehat hewan uji</li> <li>- Sertifikat analisis baku mikroba</li> <li>- <i>End user agreement</i></li> </ul>				
<b>6</b>	<b>PP.06</b>	<b>Uji Profisiensi/Uji Banding</b>	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat pemberitahuan pelaksanaan uji profisiensi/uji banding</li> <li>- Formulir konfirmasi keikutsertaan uji profisiensi/uji banding</li> <li>- Surat Perintah Bayar (SPB)</li> <li>- Surat pemberitahuan pengiriman sampel uji profisiensi/ uji banding</li> <li>- Formulir penerimaan sampel uji profisiensi/uji banding</li> <li>- Prosedur pelaksanaan uji profisiensi/uji</li> </ul>				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		banding untuk peserta - Formulir hasil pengujian uji profesiensi/ uji banding untuk peserta - Laporan pelaksanaan uji profesiensi/ uji banding				

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO